

Pendahuluan

Kondisi antara harapan membaiknya dunia usaha di Indonesia melalui lapangan kerja menunjukkan masih jauh dari harapan. Memburuknya perekonomian nasional yang disebabkan masalah keuangan yang dihadapi oleh pengusaha sebagai akibat menurunnya nilai Rupiah terhadap Dolar Amerika yang memuncak dengan ditandai tingkat lonjakan krisis yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat di tahun 2008. Kejadian tersebut mengakibatkan perekonomian Indonesia secara makro terpuruk dan banyak perusahaan yang terancam bangkrut. Kondisi yang sama juga menimpa para pelaku UMKM ketika nilai tukar Rupiah mulai mengalami depresiasi terhadap USD pada pertengahan tahun 2022 sampai sekarang. Lesunya perekonomian juga berdampak pada kegiatan para pelaku UMKM, hal ini disebabkan karena lesunya perekonomian domestik juga dibarengi dengan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi di hampir semua negara di dunia.

Ketika perekonomian Indonesia dihadapkan kepada krisis yang multi dimensi, usaha kecil menengah (UMKM) tetap bertahan dan mampu berperan untuk melaksanakan fungsinya baik

dalam memproduksi barang dan jasa di tengah kondisi usaha besar tidak mampu mempertahankan eksistensinya. Hal ini cukup beralasan mengingat sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) memiliki prospek untuk dikembangkan, juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha besar. Perbedaan ini dapat dilihat dari skala usaha, jumlah tenaga kerja, dan kapasitas produksi UMKM yang memiliki ketangguhan dan ketahanan dalam menjaga kelangsungan usaha. Selain memiliki keunggulan dibandingkan skala usaha lainnya, secara makro UMKM juga memiliki peran yang penting dalam perekonomian (Wijaya, 2022).

UMKM Indonesia dinilai juga memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Usaha kecil dan rumah tangga memutarakan hanya 10% dari total uang yang berputar tetapi menyumbang 49% terhadap Product Domestic Brutto (PDB). Unit usaha sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja berasal dari perusahaan kecil dibandingkan perusahaan besar (Riyanti, 2023). Hal ini menunjukkan usaha kecil menengah memiliki potensi untuk dikembangkan di Indonesia karena mampu memulihkan perekonomian nasional. Usaha kecil dan menengah merupakan jenis usaha yang

Koperasi dan Pertanian mengatakan bahwa dengan kegiatan pemutakhiran basis data usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), diharapkan akan diperoleh data yang valid mengenai keberadaan UMKM baru di wilayah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Program rutin yang sudah dan sedang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bojonegoro dalam rangka pengembangan UMKM antara lain pelatihan, pendampingan serta upaya memotivasi para pelaku UMKM agar bisa terus mengembangkan usaha yang telah dirintisnya. Kehadiran negara dalam hal ini sangat diharapkan oleh para pelaku UMKM baik dalam hal bantuan terhadap akses pasar yang lebih luas, maupun dalam hal permodalan dengan biaya modal yang relatif rendah dan kondusif terhadap usaha (Sholikin & Sena, 2024).

Penelitian mengenai UMKM pernah dilakukan oleh Wijaya (2022) yang menguji model perilaku berwirausaha UMKM di DIY dan Jawa Tengah dan Riyanti (2023) yang meneliti UMKM dari segi psikologis. Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi profil UMKM Kabupaten Bojonegoro, khususnya profil industri kerajinan yang potensial menembus pasar ekspor, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi terkait tata kelola usaha yang

sedang digeluti serta mempersiapkan para pelaku usaha dalam menembus pasar ekspor sebagai alternatif pasar yang selama ini mereka miliki (Sholikin, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam studi eksploratif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan definisi dan penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan. Studi eksploratif bersifat fleksibel, terbuka, serta menggali informasi lebih dalam melalui berbagai sumber yang dianggap penting. Fokus penelitian ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Muhammadiyah di Kabupaten Bojonegoro. Populasi penelitian mencakup seluruh pelaku usaha warga Muhammadiyah dalam industri UMKM, dengan sampel yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Kriteria sampel meliputi pelaku usaha yang merupakan bagian dari UMKM Muhammadiyah, berperan sebagai produsen maupun agen atau pedagang, serta beroperasi dalam wilayah Kabupaten Bojonegoro. Subjek penelitian terdiri dari pemilik atau pelaku usaha yang memiliki kompetensi dan relevansi dalam mengungkap kondisi serta permasalahan UMKM di wilayah tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan kuisisioner guna memperoleh gambaran terkait profil usaha, jenis usaha, permasalahan yang dihadapi, serta strategi yang telah diterapkan oleh pelaku UMKM untuk mengatasinya. Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang diperoleh menggunakan instrumen kuisisioner, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, reports, serta graphical summary untuk memberikan interpretasi yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan menghasilkan output berupa katalog UMKM Kerajinan Kabupaten Bojonegoro secara detail dan komprehensif, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM di daerah tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Aspek Operasional Usaha UMKM

Manajemen operasional adalah proses mengubah sumber daya yang tersedia menjadi hasil yang lebih bermanfaat daripada sebelumnya. Akibatnya, diyakini bahwa manajemen operasi yang efektif dan efisien sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan beroperasi dalam

lingkungan bisnis yang sangat dinamis saat ini, di mana sumber daya yang terbatas dan ketidakpastian dalam kegiatan bisnis yang merupakan hal biasa yang terkait dunia bisnis. Ketika pasar menerapkan efisiensi tinggi, kemudian perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, maka perusahaan tersebut akan segera tersingkirkan. Sehingga perusahaan memerlukan keunggulan yang kompetitif agar tetap bertahan. Kondisi optimalisasi sumber daya internal merupakan suatu keharusan bagi setiap perusahaan yang ingin mempertahankan sebuah keunggulan kompetitif. Hal ini harus dibarengi dengan perbaikan proses internal terus-menerus dari perusahaan (Sholikin, 2024).

Untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif tersebut, manajemen operasional (MO) dapat memainkan peran utama. Sutawidjaya dan Nugroho (2016) menjelaskan manajemen operasi merupakan bagian dari ilmu manajemen, di mana manajemen berarti seni tentang bagaimana kita dapat mengelola pekerjaan kita melalui kolaborasi, koordinasi dan komunikasi dengan orang lain, sehingga manajemen sering

diartikan sebagai seni mengelola orang lain. Lebih lanjut Sutawidjaya dan Nugroho (2016) menjelaskan bahwa manajemen operasi adalah upaya manajemen yang optimal dalam penggunaan berbagai sumber daya dalam perusahaan, yang terdiri dari tenaga kerja, mesin, peralatan, bahan baku, bahan dan sebagainya dalam proses mengubah sumber daya menjadi produk berupa barang atau jasa. Sehingga proses perubahan atau transformasi dalam manajemen operasional terdiri dari input-proses dan output.

Pentingnya manajemen operasional dalam perusahaan atau organisasi, karena wilayah inilah yang menghasilkan produk, dan keberadaan produk merupakan inti dari keberadaan suatu perusahaan atau organisasi, baik itu perusahaan dalam skala mikro sampai dengan skala besar. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan jenis skala usaha yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah, karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia, dan secara historis pemain utama dalam kegiatan ekonomi domestik ada pada UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

(Kemenkop UKM) Maret 2021, jumlah UMKM di Tanah Air telah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun (<https://pip.kemenkeu.go.id>, 2022).

Dengan demikian wilayah manajemen operasional pada UMKM merupakan wilayah yang harus mendapatkan perhatian utama dari manajemen perusahaan, hal ini terkait dengan permasalahan utama yang dihadapi UMKM saat ini, seperti yang diungkapkan oleh menteri perdagangan Lutfi yaitu terdapat tiga permasalahan utama yang harus dihadapi oleh UMKM Indonesia, pertama adalah kurangnya pengalaman, kedua adalah kurangnya jaringan atau networking, yang menyulitkan untuk berkompetisi, dan ketiga UMKM Indonesia belum mempunyai daya saing yang baik (Liputuan6.com, 2021). Merujuk pada permasalahan tersebut, permasalahan ketiga yaitu kurangnya daya saing yang baik atau yang kompetitif merupakan tantangan yang dihadapi UMKM, dimana perbaikan dan atau inovasi terhadap daya saing ini dapat dimunculkan dari wilayah manajemen operasional, yaitu dari output yang dihasilkan. UMKM dapat mempunyai

mengurangi risiko pribadi pemilik. Perseroan Terbatas sering memerlukan proses pendirian yang lebih rumit dan perizinan yang lebih banyak. Warga Muhammadiyah dalam kategori ini sejumlah 0 %.

- Kemitraan (Partnership): Dalam kemitraan, dua orang atau lebih berbagi kepemilikan, tanggung jawab, dan keuntungan usaha. Kemitraan dapat bersifat terbatas (LP) atau umum (GP). Kemitraan umum melibatkan keterlibatan aktif dari semua mitra dalam pengelolaan bisnis, sementara kemitraan terbatas memungkinkan mitra yang tidak terlibat secara aktif. Warga Muhammadiyah dalam kategori ini sejumlah 20.48 %.
- Persekutuan Komanditer, sering disingkat sebagai CV, adalah salah satu bentuk struktur bisnis di mana ada dua jenis mitra: mitra komplementer (aktif) dan mitra komanditer (pasif). Ini adalah struktur bisnis yang umum di beberapa negara dan memberikan keleluasaan dalam hal kepemilikan dan manajemen bisnis. Warga Muhammadiyah

dalam kategori ini sejumlah 1.41 %.

- Bentuk yang lainnya yaitu kooperatif adalah struktur kepemilikan yang dimiliki bersama oleh anggota yang berpartisipasi dalam usaha tersebut. Keputusan diambil secara demokratis oleh anggota kooperatif. Kooperatif sering digunakan dalam sektor pertanian, konsumen, dan sektor lainnya yang mendorong kerjasama dan keadilan. Atau bentuk Waralaba (Franchise): Dalam model bisnis waralaba, pemilik bisnis (franchisee) membayar biaya kepada pemilik merek (franchisor) untuk menggunakan merek, sistem, dan dukungan yang telah ada. Franchisee memiliki kendali operasional sehari-hari atas bisnisnya sendiri, tetapi harus mengikuti pedoman dan standar yang ditetapkan oleh franchisor. Warga Muhammadiyah dalam kategori ini sejumlah 0.4 %.

Berkaitan dengan jenis pendanaan pendanaan UMKM Milik warga Muhammadiyah memiliki

Tabel.2. Rencana usaha dan jenis pendanaan oleh UMKM Milik warga Muhammadiyah

	jumlah	100
jumlah (untuk seluruh)	14	3,88
jumlah yang diperlukan di masa	115	33,1
untuk membeli mesin atau peralatan	15	14,8
untuk operasional; contoh: modal kerja (memulai operasi atau membeli)	185	38,6
untuk modal; contoh: perlu memutar modal kembali (memutar modal)	84	19,4
jumlah lainnya	14	3,88

Sumber : Diolah peneliti, 2024

Mayoritas 39.67 % membutuhkan dana operasional untuk modal kerja, membeli bahan baku dan membayar gaji karyawan sebagai kebutuhan dana utama dalam pengembangan UMKM-nya. Sementara 23.14 % merasa bahwa membutuhkan dana modal, dana operasional dan juga dana untuk membeli mesin sebagai kebutuhan utama pengembangan usaha UMKM-nya. Disisi lain 19.42 % mengatakan membutuhkan dana untuk dana modal, sedangkan 14.88% membutuhkan dana untuk membeli mesin dan peralatan. Sisanya 2.89 % mengatakan bahwa banyak keperluan lain yang juga membutuhkan dana seperti mengurus ijin dan lain sebagainya.

Aspek Informasi Keuangan UMKM

Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan,

sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Mengelola keuangan suatu usaha (bisnis) dengan baik, bukan hanya dilakukan oleh usaha yang besar saja. Tetapi usaha kecil dan menengah harus melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar. Karena kinerja kese-luruhan suatu usaha bisnis sangat dipengaruhi oleh kinerja keuangan usaha yang bersangkutan. Pengertian umum dari pernyataan diatas adalah bahwa semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut meraih sukses.

Menurut Brealey, Myers dan Marcus dalam (Sudarmi, 2018, p. 69) mendefinisikan struktur modal sebagai penggalangan dana yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk investasi dan kegiatan operasional perusahaan. Sumber daya modal finansial yang kuat akan memberikan kekuatan pula sehingga dalam melakukan kegiatan pembangunan perekonomian akan dapat dilaksanakan. Dalam sektor UMKM, modal finansial juga berperan cukup signifikan untuk meningkatkan kinerja suatu UMKM. Untuk mengetahui ukuran aspek keuangan dalam suatu UMKM dapat dilihat dengan menggunakan beberapa indikator yang ada. Munizu

dalam (Sudarmi, 2018, p. 68) mengemukakan ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur modal finansial sebuah UMKM, diantaranya:

- a) Modal Sendiri. Penggunaan modal sendiri dalam menjalankan usaha serta kemampuan dalam mengelola aset finansial.
- b) Modal Pinjaman. Kemudahan akses untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan baik dari bank maupun non bank.
- c) Tingkat keuntungan dan akumulasi modal. Menggunakan keuntungan yang ada untuk menambah modal dalam rangka mengembangkan unit usaha.

Jumlah pegawai dalam UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) bervariasi secara signifikan tergantung pada jenis usaha, industri, lokasi geografis, dan tingkat perkembangan bisnis. UMKM adalah kategori bisnis yang mencakup berbagai jenis usaha dengan berbagai ukuran dan skala operasional. Berikut adalah gambaran umum tentang jumlah pegawai dalam UMKM:

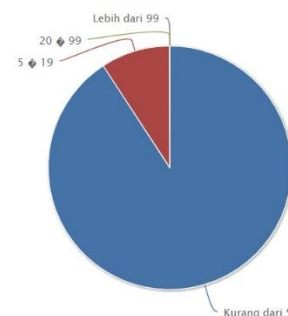
- Usaha Mikro adalah bisnis yang paling kecil dalam kategori UMKM. Biasanya, usaha mikro memiliki kurang dari 10

karyawan, dan seringkali hanya dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang (pemilik tunggal).

- Usaha kecil memiliki jangkauan yang lebih luas dalam hal jumlah karyawan dibandingkan dengan usaha mikro. Mereka biasanya memiliki 10 hingga 50 karyawan. Namun, ini juga dapat bervariasi tergantung pada jenis industri dan wilayah.
- Usaha Menengah memiliki jumlah karyawan yang lebih besar dibandingkan dengan usaha mikro dan kecil. Mereka biasanya memiliki 51 hingga 250 karyawan, tetapi juga bisa lebih besar tergantung pada jenis bisnis dan sektor industri.

Berdasarkan jumlah pegawai di UMKM Milik warga Muhammadiyah yang di miliki. Data seperti berikut ini :

Tabel 3. Jumlah pegawai di UMKM Milik warga Muhammadiyah

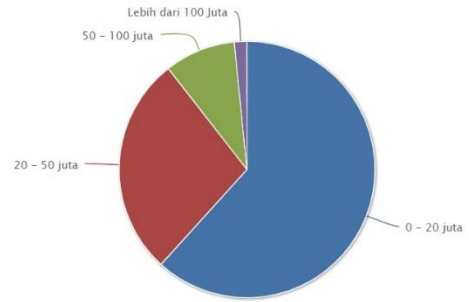


Sumber : Diolah peneliti, 2024

Penting untuk diingat bahwa definisi jumlah karyawan ini dapat berbeda di berbagai negara dan lembaga pemerintah. Sebagai contoh, dalam beberapa negara, usaha mikro mungkin didefinisikan sebagai bisnis yang memiliki kurang dari 5 karyawan, sedangkan di tempat lain, definisi yang lebih longgar dapat digunakan. Selain itu, perkembangan bisnis UMKM juga dapat memengaruhi jumlah karyawan. UMKM yang berkembang pesat mungkin akan mempekerjakan lebih banyak orang seiring berjalannya waktu. Penting untuk mengingat bahwa UMKM adalah bagian penting dari perekonomian global dan sering kali menjadi sumber utama pekerjaan di banyak negara. Jumlah karyawan dalam UMKM dapat bervariasi, tetapi usaha-usaha ini memiliki peran yang signifikan dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya berkaitan dengan berapa jumlah uang yang di butuhkan untuk modal awal, seperti uang untuk beli mesin, bahan baku, sewa tempat, izin usaha, dll. UMKM Milik warga Muhammadiyah terbagi dalam beberapa jawaban seperti dibawah ini :

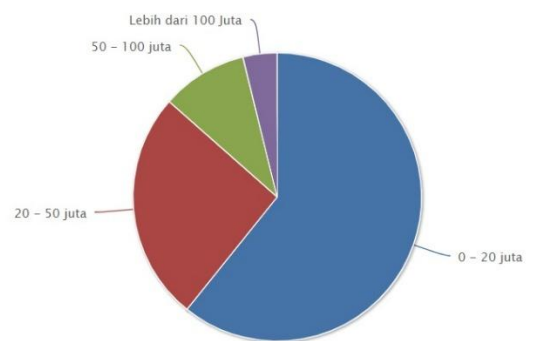
Tabel 4. Jumlah uang yang di butuhkan untuk modal awal UMKM Milik warga Muhammadiyah



Sumber : Diolah peneliti, 2024

Berkaitan dengan keuntungan rata-rata pertahun usaha milik warga Muhammadiyah tercerminkan dalam table dibawah ini :

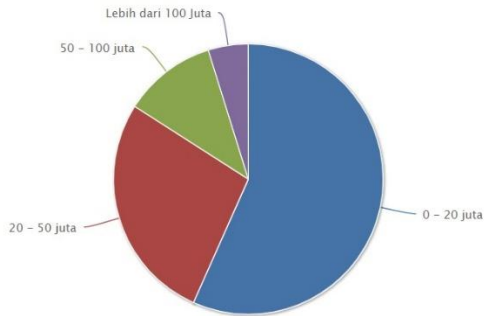
Tabel 5. Keuntungan rata-rata pertahun usaha milik warga Muhammadiyah



Sumber : Diolah peneliti, 2024

Selanjutnya nilai modal saat ini dari usaha milik warga Muhammadiyah tercerminkan dalam table dibawah ini :

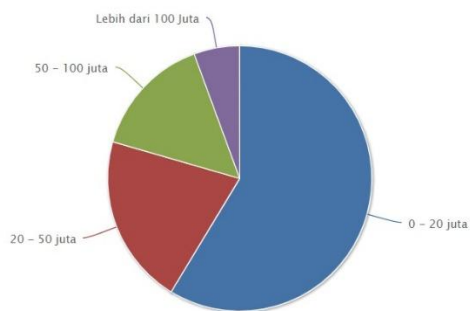
Tabel 6. Nilai modal saat ini dari usaha milik warga Muhammadiyah



Sumber : Diolah peneliti, 2024

Selanjutnya omset rata-rata saat ini dari usaha milik warga Muhammadiyah tercerminkan dalam table dibawah ini :

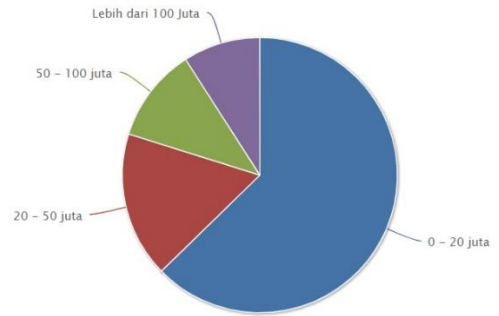
Tabel 7. Omset rata-rata saat ini dari usaha milik warga Muhammadiyah



Sumber : Diolah peneliti, 2024

Selanjutnya rata-rata total aset (kas dan kredit) jumlah uang yang ada di kantor, tabungan, utang, bangunan, mesin saat ini dari usaha milik warga Muhammadiyah tercerminkan dalam table dibawah ini :

Tabel 8. Rata-rata total aset usaha milik warga Muhammadiyah



Sumber : Diolah peneliti, 2024

Aspek keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan UMKM. Aspek keuangan berkaitan dengan pengelolaan dana yang dimiliki oleh UMKM, mulai dari pendanaan, arus kas, hingga profitabilitas. Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM untuk mencapai tujuan bisnisnya, seperti meningkatkan penjualan, mengurangi biaya, dan meningkatkan keuntungan. Aspek keuangan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan UMKM. Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM untuk mencapai tujuan bisnisnya dan meningkatkan daya saingnya.

Aspek Pembiayaan UMKM

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut ada lima permasalahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air. Pertama, adanya perbedaan definisi

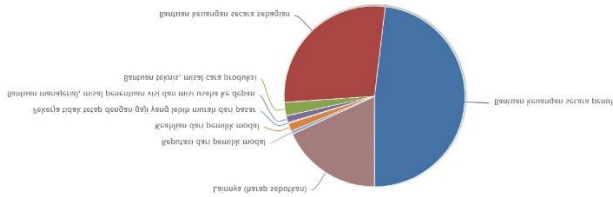
UMKM antarlembaga serta belum adanya basis data yang terintegrasi. Kedua, jumlah UMKM yang besar belum seimbang dengan kontribusinya pada Produk Domestik Bruto (PDB). Sebanyak 99 persen usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM, namun hanya berkontribusi 57 persen terhadap PDB dan hanya 14 persen terhadap total ekspor Indonesia. Ketiga, rendahnya UMKM yang terjalin dalam kemitraan, termasuk berjejaring dalam rantai nilai global (global value chain). Berdasarkan catatan Bappenas, 93 persen usaha mikro dan kecil (UMK) tidak menjalin kemitraan. Keempat, akses pembiayaan bagi UMKM masih rendah. Mengacu pada data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019, 88 persen UMK tidak memperoleh atau mengajukan kredit. Adapun rasio kredit UMKM di perbankan terhadap total kredit perbankan 20 persen. Kelima, rendahnya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usahanya, termasuk digitalisasi. Saat ini, 94 persen UMK tidak menggunakan komputer dalam menjalankan usahanya, dan 90 persen UMK tidak menggunakan internet (Azizah, 2021).

Dari permasalahan-permasalahan di atas, aspek pembiayaan menjadi penting karena perkembangan pelaku

UMKM di Indonesia terhambat akibat minimnya pembiayaan, terlebih lagi setelah Pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia sejak Maret 2020 (Perdana, 2021). Sulitnya akses bagi usaha menengah, kecil, dan mikro atau UMKM untuk memperoleh kredit dinilai menyebabkan rasio wirausaha Indonesia sangat kecil hanya 3,1 persen dari jumlah penduduk. kondisi itu tak lepas dari sulitnya pelaku UMKM untuk memperoleh kredit usaha. Berdasarkan riset Ease of Doing Business 2020, Indonesia menempati peringkat ke-48 dalam hal kemudahan mendapatkan kredit bagi UMKM, sejajar dengan Thailand. Lain halnya, Malaysia berada di peringkat ke-37, lalu Vietnam dan India di peringkat ke-25. Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan, terlebih perekonomian Indonesia sangat ditopang oleh UMKM. Sebanyak 90 persen UMKM mengalami penurunan omzet selama masa pandemi dan 75,2 persen usaha mikro kesulitan mendapatkan modal kerja untuk kembali memulai usahanya. Tak heran jika kemudian para pelaku UMKM itu mencari rentenir atau penyedia dana lainnya yang sangat mudah diakses, meskipun memberikan bunga yang terlampau tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan kemudahan akses pembiayaan menjadi kunci untuk

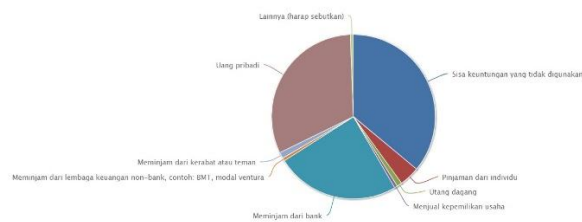
Berkaitan dengan harapan dari pemberi dana UMKM milik warga Muhammadiyah menjawab dengan berbagai opsi dibawah ini :

Tabel 10. Harapan Pelaku UMKM milik warga Muhammadiyah kepada Pemberi Modal



Sumber : Diolah peneliti, 2024

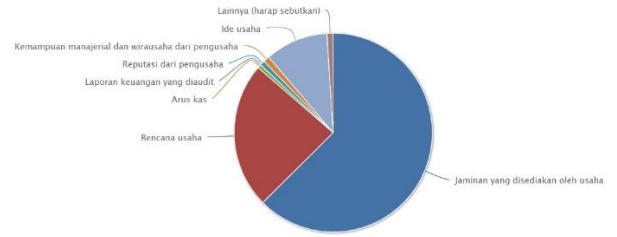
Tabel 11. Dari mana modal usaha UMKM milik warga Muhammadiyah



Sumber : Diolah peneliti, 2024

Berkaitan dengan pengetahuan peminjaman untuk pengajuan pinjaman (Bank), pelaku UMKM Milik warga Muhammadiyah memiliki berbagai opsional :

Tabel 12. Pengetahuan pengajuan pinjaman oleh Pelaku UMKM Milik warga Muhammadiyah



Sumber : Diolah peneliti, 2024

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Namun demikian, UMKM masih memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usahanya. Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, baik karena kendala teknis, maupun kendala nonteknis. Oleh karena itu, literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM harus terus ditingkatkan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pembiayaan formal kepada UMKM. Upaya tersebut diharapkan mendorong pembiayaan yang efektif untuk meningkatkan skala usaha UMKM sesuai amanat UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020.

Aspek Peran Pemerintah UMKM

Menteri keuangan, Ibu Sri Mulyani pernah menyampaikan bahwa pengembangan dan pemberdayaan

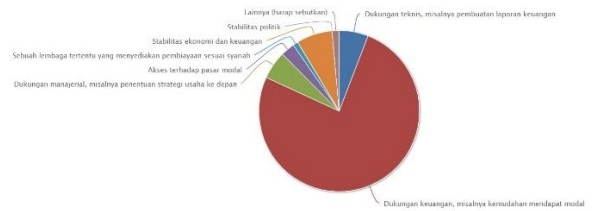
pembiayaan untuk modal kerja dan investasinya. Pemerintah memberikan dukungan melalui program KUR dan pembiayaan Ultra Mikro

- Digitalisasi UMKM, Digitalisasi dapat memberikan banyak manfaat bagi UMKM, termasuk efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing. Hingga Januari 2022, sebanyak 17,2 juta UMKM telah terdigitalisasi. Targetnya, 40 juta UMKM akan terdigitalisasi pada tahun 2024
- Sinergi dan Koordinasi, peningkatan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademi, dan juga sektor swasta, termasuk juga bagaimana mengembangkan skema keuangan syariah untuk UMKM sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berkaitan dengan kontribusi pemerintah Pelaku UMKM milik Warga Muhammadiyah memiliki berbagai pandangan strategis terkait hal tersebut.

Seperti tertuang dalam tabel dibawah ini :

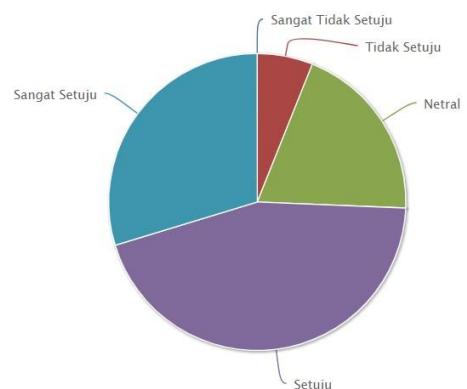
Tabel 13. Harapan untuk kontribusi pemerintah bagi Pelaku UMKM milik Warga Muhammadiyah



Sumber : Diolah peneliti, 2024

Persetujuan warga Muhammadiyah berkaitan dengan penggunaan Bank sebagai lembaga yang tepat untuk membiayai UMKM melalui skema bagi hasil, tertuang dalam table dibawah ini ;

Tabel 14. Persetujuan warga Muhammadiyah berkaitan dengan penggunaan Bank



Sumber : Diolah peneliti, 2024

praktik KKN. Perlu ditekankan bahwa manajemen konflik dalam pendekatan *illiberal peacebuilding* yang ada bukanlah kegagalan sistem, melainkan sebuah upaya untuk mengelola ketegangan sosial dan politik yang ada dengan cara yang lebih terkendali dan terstruktur. Oleh karena itu, pendekatan ini harus dilihat sebagai strategi yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi suatu negara sehingga dapat memberikan kedamaian sosial tanpa mengorbankan kestabilan negara tersebut.

Referensi

Jurnal

- Afandi, M. (2013). PERLAWANAN EKSTRA LEGAL: "TRANSFORMASI PERLAWANAN PETANI MENGHADAPI KORPORASI PERKEBUNAN." *BHUMI (Jurnal Pertanahan STPN)*.
- Anugrah, I. (2018). Elite-peasant relations in post-authoritarian Indonesia: decentralization, dispossession, and counter-movement. *Elite-Peasant Relations in Post-Authoritarian Indonesia*.
- Astuti, P. (2011). KEKERASAN DALAM KONFLIK AGRARIA: KEGAGALAN NEGARA DALAM MENCIPTAKAN KEADILAN DI BIDANG PERTANAHAN. Diponegoro University.
- Cheung, H. (2019). The Rise of Illiberal Peacebuilding and Authoritarian Modes of Conflict Management. *The Cornell International Affairs Review*.
- Cramb, R., & Sujang, P. S. (2011). 'Shifting ground': Renegotiating land rights and rural livelihoods in Sarawak, Malaysia. *Asia Pacific Viewpoint*, 52(2), 136–147.
- Dhiaulhaq, A., De Bruyn, T., & Gritten, D. (2014). The use and effectiveness of mediation in forest and land conflict transformation in Southeast Asia: Case studies from Cambodia, Indonesia and Thailand. *Environmental Science & Policy*, 45, 132–145.
- Diprose, R., & Azca, M. N. (2020). Conflict management in Indonesia's post-authoritarian democracy: resource contestation, power dynamics and brokerage. *Conflict Security and Development*, 20(1), 191–221.
- Kusbianto, K. (2018). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERKEBUNAN DI SUMATERA UTARA. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 6(1), 109–125.

- Smith, C. Q., Waldorf, L., Venugopal, R., & McCarthy, G. (2020). Illiberal peace-building in Asia: a comparative overview. *Conflict, Security and Development*, 20(1), 1–14.
- Syahyuti, S. (2018). Fenomena Global Akuisisi Lahan (Land Grabbing) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Petani Lokal. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 36(1), 1-12.
- Vonika, D. (2020). Historical Review of Military Involvement In Indonesian Politics. *International Journal on Social Science, Economics and Art*.
- Artikel**
- BARA KONFLIK AGRARIA: PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Rakyat Meningkat. (2022). Catatan Akhir Tahun 2022 Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Bersatu Melawan Perampasan Tanah, Jalankan Reforma Agraria Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat. (2019). Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. <https://www.elsam.or.id/uncategorized/bersatu-melawan-perampasan-tanah-jalankan-reforma-agraria-untuk-keadilan-dan-kesejahteraan-rakyat>
- Hak Guna Usaha Menurut Aturan Hukum. (2023). SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/hak-guna-usaha-menurut-aturan-hukum/?lang=id>
- Hariyanti, M. (2015). Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/me-ykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman>
- H, S. R. M., & Rachman, N. F. (2012). Mesuji, Cermin Konflik Agraria yang Kronis (1). Perkumpulan HuMa. <https://www.huma.or.id/uncategorized-id/dari-mesuji-untuk-reforma-agraria-1>
- Kader, S. A. (2024). Keterlibatan Militer dalam Konflik Agraria di Indonesia Pasca Reformasi. ARC Indonesia. <https://arc.or.id/keterlibatan-militer-dalam-konflik-agraria-di-indonesia-pasca-reformasi/>
- Main Serobot di Gurilla. (2024). Konsorsium Pembaruan Agraria; Konsorsium Pembaruan Agraria. <https://www.kpa.or.id/2024/01/24/main-serobot-di-gurilla/>
- Munthe, E. G. (2023). Berita Foto: Warga Desa Sampali Mencari Keadilan, LBH Medan: Mengecam Keras Penggusuran Paksa Rumah. *Tribun Medan*. <https://medan.tribunnews.com/2023/06/02/berita-foto-warga-desa->

